

Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone

Sri Rahayu Astitah Basri¹

¹⁾ Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi UNM

ABSTRAK

SRI RAHAYU ASTITAH BASRI. 2019. “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone”. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Ibu Tuti Supatminingsih dan Bapak Muh Ihsan Said Ahmad.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu Pengumpulan data untuk diuji hipotesis dan menjawab pertanyaan dari subjek penelitian dengan melalui pengumpulan daftar pertanyaan dalam survei. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah, (1) Kepala Desa, (2) Sekertaris Desa, (3) Ketua BPD, (4) Kepala Dusun, (5) Toko masyarakat, (6) Masyarakat Desa Leppangeng. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Efektifitas Dana Desa di Leppangeng sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama. Pembangunan seperti Jalan Tani, Saluran Pembuangan, kantor desa, Gedung Paud dan Pembenahan Kantor Desa. *Kedua* Pembangunan yang dilakukan oleh tim pelaksana Dana Desa dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan dengan pengawasan semua pihak termaksud masyarakat. Mengawasi bersama pembangunan infrastruktur menjadi sesuai seperti yang direncanakan di awal. Efektifitas Dana Desa Di Leppangeng sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Agung Pratama Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di jelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelolan asset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman 2015:255).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Pemerintah selama ini menjalankan sebuah program besar yang diharapkan menyentuh masyarakat pendesaan secara menyeluruh. Program dana desa menjadi senjata dalam pembangunan dan pemberdayaan desa di seluruh Indonesia. Yang di maksud dengan “Dana Desa” adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Widjaja (2011:165) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga

masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Pembangunan desa yang berkelanjutan akan menjadikan sebuah desa berkembang dalam segala aspek terutama aspek infrastruktur yang merupakan sebuah kebutuhan masyarakat pedesaan. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di desa dengan perkotaan membuat pembangunan desa semakin mundur. Kemunduran pembangunan ini membuat kehidupan masyarakat pedesaan menjadi tidak bisa maju secara lebih cepat.

Pembangunan desa agar menjadi setara dengan pembangunan kota diperlukan sebuah kerja keras dari berbagai unsur yang ada seperti pemerintah daerah, unsur desa dan masyarakat itu sendiri. Tujuan dari pembangunan adalah untuk menjamin sebuah kelangsungan pembangunan sehingga menjadikan taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik.

Pada dasarnya dana desa tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur semata, akan tetapi pemberdayaan masyarakat menjadi penting diperhatikan dan dilaksanakan supaya pembangunan dapat merata. Pemberdayaan dapat berupa penerapan modal usaha produktif meliputi usaha masyarakat setempat.

Pembangunan yang melibatkan semua unsur desa diharapkan tepat sasaran karena dikerjakan oleh masyarakat setempat. Pola seperti ini akan semakin mendekati pembangunan yang masyarakat harapkan. Dana desa yang sangat besar dikucurkan untuk setiap desa akan semakin membuat masyarakat akan hati-hati dalam penggunaannya karena membutuhkan pertanggung jawaban yang ketat. Dana desa yang besar ini oleh masyarakat dikelola secara bersama untuk melakukan pembangunan dalam berbagai aspek kebutuhan masyarakat secara luas.

Pembangunan yang dilakukan melalui dana desa pada dasarnya memiliki tujuan yang cukup baik. Akan tetapi tingkat efektivitas dari pembangunan masih belum teruji manfaatnya karena infrastruktur yang dibangun masih ada yang belum dapat difungsikan secara tepat. Hal ini dapat merugikan masyarakat itu sendiri karena tidak dapat digunakan oleh masyarakat hasil dari pembangunan tersebut. Efektivitas dari sebuah pembangunan tidak semata-mata diukur dari manfaat pembangunan akan tetapi juga diukur dari kualitas sebuah pembangunan baik dari segi fisik infrastruktur dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat serta pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung.

Desa Leppangeng yang terletak sekitar 26 km dari kota Watampone berada dalam Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Secara geografis Desa Leppangeng dikelilingi oleh persawahan produktif. Masyarakatnya adalah sebagian besar petani dan peternak sapi. Jumlah penduduk Desa Leppangeng adalah 1.813 jiwa. Apabila ditinjau dari letak geografis desa ini berbatasan dengan Desa Timurung disebelah barat, sebelah timur berbatasan dengan desa Laponrong.

Melihat letak geografis di atas tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan sosial yang sering muncul adalah masalah yang berkaitan dengan pertanian dan persolan infrastruktur desa yang belum cukup memadai. Berkaitan dengan infrastruktur yang belum memadai membuat masyarakat bergelut dalam pola lama yang belum maju seperti MCK yang tidak bersih, jalan desa masih belum di aspal, saluran pembuangan limbah rumah tangga yang belum baik .

Nurcholis (2011:104) Pembangunan yang dilakukan melalui dana desa pada dasarnya memiliki tujuan yang cukup baik. Akan tetapi tingkat efektivitas dari pembangunan masih belum teruji mamfaatnya karena infrastruktur yang dibangun masih ada yang belum dapat difungsikan secara tepat. Hal ini dapat merugikan masyarakat itu sendiri karena tidak dapat digunakan oleh masyarakat hasil dari pembangunan tersebut. Efektivitas dari sebuah pembangunan tidak semata- mata diukur dari manfaat pembangunan saja akan tetapi juga diukur dari kualitas sebuah pembangunan baik dari segi fisik infrastruktur dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat serta pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu pada tahun 2016, 2017, dan 2018 Desa leppangeng menerima dana Desa. Adapun Anggaran Dana Desa yang di terima dan dikelola di Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone pada tahun 2018,2017, dan 2016 di uraikan pada table 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1. Jumlah dana yang diterima Desa Leppangeng

Tahun	Jumlah Anggaran Dana Desa Yang di Kelola
2016	Rp 608. 807. 000
2017	Rp 775. 331. 000
2018	Rp 975. 136. 000

Sumber : Kantor Desa Leppangeng 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat secara jelas bahwa Pemerintah Desa Leppangeng menerima anggaran dana Desa setiap tahun semakin meningkat, apakah dana Desa yang dikelola Desa Leppangeng, dikelola dengan efektif. Dan kualitas pembangunan dari segi fisik infrstruktur dapat dirasakan oleh warga Desa dan berdampak pada peningkatan pendapatan warga Desa baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan jumlah dana desa yang terus meningkat, secara empiris belum dirsakan oleh masyarakat Leppangangeng belum maksimal. Kesejahteraan belum tercapai hal ini tergambar dari infrastruktur yang dibangun masih ada yang belum dapat difungsikan secara tepat, masalah yang berkaitan dengan pertanian dan persolan infrastruktur desa yang belum cukup memadai. Berkaitan dengan infrastruktur yang belum memadai membuat masyarakat bergelut dalam pola lama yang belum maju seperti MCK yang tidak bersih, jalan desa masih belum di aspal, saluran pembuangan limbah rumah tangga yang belum baik .

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone”*.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan

Perencanaan dan pembangunan merupakan suatu kesatuan yang memiliki kaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dari suatu proses pembangunan, perencanaan pembangunan dijadikan sebagai bahan, pedoman, atau acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan perencanaan atau *action plan*. Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya bersifat penelitian atau riset karena didalam proses pelaksanaannya lebih banyak menggunakan metode-metode riset yakni mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi pada lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat, baik data-data yang bersifat konseptual maupun data-data bersifat eksperimental yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan itu sendiri. Kusumah dan Suoriady (2003).

2. Pembangunan Daerah

Menurut Sun'an (2015:20) Pembangunan Daerah merupakan semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk maupun tidak termasuk urusan rumah tangga daerah yang meliputi nerbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari Pemerintah (APBD dan APBN) dan bersumber dari masyarakat.

(Kunarjo,2002) Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dibiayai oleh: (a) Pemerintah Pusat sebagai pelaksana asas dekonsentrasi; (b) Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas perbantuan. Sedangkan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk: (a) Badan Usaha Milik Negara, (b) Badan Usaha Milik Daerah dan kegiatan lainnya.

Dalam usahanya, pemerintah pada umumnya hanyalah menyediakan untuk memperlancar kegiatan perekonomian dan selanjutnya menyerahkan kepada pihak swasta untuk mengembangkan sector ekonomi yang modern. Disamping itu pemerintah daerah perlu juga untuk secara aktif mengadakan perencanaan atau program pembangunan daerahnya dengan adanya pelaksanaan asas desentralisasi.

3. Pembangunan Desa

Menurut Nurman (2015:241) Pembangunan Desa (community development) dan pembangunan masyarakat Desa (rural development) adalah usaha Pemerintah dan masyarakat yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan.

Menurut Nurcholis (2011:106) Dalam melaksanakan pembangunan di Desa, perencanaan pembangunan harus menghitung bahwa hasilnya benar-benar membawa manfaat, yaitu meningkatkan kesejahteraan warga Desa seperti pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, pintu air, serta

saluran tersier dan skunder, pembangunan pasar Desa, pembangunan lembaga pendidikan seperti TPA, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan pembangunan tempat ibadah.

Nurman (2015:88) Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system social, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Infrastruktur merupakan suatu sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas public yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup social dan ekonomi (Grigg,1998).

(Kodoatie,2003) Peranan infrastruktur adalah sebagai mediator antar system ekonomi dan system social di dalam tatatan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi penting. Infrastuktur yang kurang (atau bahkan tidak) berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi manusia. Hal tersebut berarti bahwa keberadaan system infrastruktur mutlak dibutuhkan didalam berbagai jenis kegiatan.

4. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

KBBI (2008:314) Secara bahasa Dana Desa terdapat dua kata yaitu Dana dan Desa. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Sedangkan desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* (bahasa sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Syarifuddin (2010:03) Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Raharjo Adisasmita (2013:16) Secara garis besar, anggaran pembangunan daerah berasal dari empat kategori sumber utama yaitu:

- 1) Sumber-sumber pendapatan langsung seperti pajak dan retribusi yang diberikan kewenangan kepada provinsi maupun kabupaten untuk memungut dan menggunkannya.
- 2) Sumber-sumber pendapatan yang diberikan oleh pemerintah pusat seperti pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah pusat dan diberikan utuh atau sebagian kepada pemerintah provinsi atau kabupaten

- 3) Hibah pemerintah pusat seperti alokasi anggaran pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi atau kabupaten dalam bentuk subsidi daerah otonom dan proyek-proyek Instruksi Presiden (Inpres) yang meliputi Inpres Desa, Inpres Desa Tertinggal, Inpres Kesehatan, Inpres Jalan Kabupaten dan Provinsi, Inpres Reboisasi dan sebagainya.
- 4) Sumber yang berbentuk pinjaman seperti pinjaman Inpres Pasar, pinjaman rekening dana investasi, pinjaman dari badan donor asing, dan pinjaman dari sumber-sumber lain yang diperbolehkan.

b. Sejarah Dana Desa

Raharjo Adisasmita (2013:14) menyebutkan bahwa dalam pembangunan pendesaan pembahasan paradigma pembangunan sangat penting. Paradigma adalah kesepakatan beberapa pakar mengenai apa dan bagaimana pembangunan dilaksanakan. Dengan demikian dapat diketahui dan fokus pembangunan yang diberikan perhatian sehingga strategi dan kebijaksanaan pembangunan pendesaan dapat difokuskan secara terarah dan serasi.

Kartasasmita (2001:66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Kartasasmita (2001:14) Orde Lama mewariskan kehancuran ekonomi pada Orde Baru. Untuk membangun keadaan ekonomi yang sangat buruk tersebut (misalkan inflasi 700%/tahun) diperlukan paradigma dengan pola pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hal ini berhasil dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan desa merupakan prioritas yang terus digalakkan. Pemberian bantuan berupa Inpres Bantuan Desa yang dikucurkan sejak awal tahun 1970-an pada dasarnya dimaksudkan sebagai perangsang atau stimulan untuk meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat rupanya belum memberikan dampak yang diharapkan, karena oleh sebagian desa, terutama desa yang kurang mampu justru Subsidi/Bantuan Desa dianggap sebagai modal pokok yang kurang memberikan dampak positif, terutama dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan antara Desa.

Namun dengan dihapuskannya Inpres Bantuan Desa mengakibatkan desa merasa kehilangan salah satu sumber daya keuangan yang sebelumnya dapat membantu penyelenggaraan pembangunan di desa, sehingga menjadi salah satu pendorong munculnya gagasan untuk memberikan bantuan dana kepada desa melalui konsep Alokasi Dana Desa (ADD). Program Dana Desa yang bergulir diatur dalam Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015.

Program dana desa ini awalnya diawali dengan program lain yang serupa seperti BKPG, ADG dan PMPN Mandiri Pendesaan. Desain ini berubah menjadi Alokasi Dana Desa (ADD) yang memiliki tujuan yang hampir sama dengan program sebelumnya, yaitu untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

c. Regulasi tentang Dana Desa

Sebagai sebuah program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat maka perlu sebuah regulasi atau aturan yang menopang terlaksananya program tersebut di daerah. Aturan tersebut dimulai dengan sebuah undang-undang dan dilanjutkan dengan peraturan lanjutan di tingkat daerah masing-masing baik sebagai peraturan. Pemerintah pusat membuat sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) no 22 Tahun 2015 tentang program Dana Desa.

d. Tujuan Program Dana Desa

Kartasasmita (2001:58) Program pemerintah pada dasarnya harus memiliki tujuan yang jelas dan memiliki dampak yang baik bagi masyarakat. Pada hakekatnya tujuan umum dari pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan social dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan pembanguna secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional.

Menurut Astadi dalam makalahnya alokasi dana desa,yang diakses pada 6 Februari 2019 Alokasi Dana Desa pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.
- e) Secara umum Dana Desa memiliki tujuan besar yaitu sebagai pilar pembangunan dan perberdayaan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan. Dana tersebut diupayakan dalam bentuk pembangunan potensi desa sehingga masyarakat desa terberdayakan.

5. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Kartasasmita (2001:66) Dana Desa akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintahan melalui rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui rekening kas Umum Daerah (RKUD) kemudian disalurkan kepada Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran dana Desa dari RKUN ke RKUD baru dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi dan disahkan oleh Gubernur, yang telah didalamnya memuat mata anggaran Dana Desa yang berasal dari APBN.

2. Peraturan kepala Daerah yaitu peraturan Bupati/walikota tentang rincian Dana Desa di Wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan, Kemudian dalam waktu tujuh hari kerja setelah diterimanya Dana Desa di RKUD, Pemerintah Daerah harus mentransfer Dana Desa dari RKUD ke RKD, Desa harus menyampaikan peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah dievaluasi dan disahkan oleh Bupati/Walikota sebagai persyaratan pencarian Dana ke Desa.

6. Efektivitas Dana Desa

a. Pengertian Efektivitas

KBBI(2008:374) Efektivitas adalah sebuah kosa kata Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris *Effective*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Efektivitas berarti dapat membawa hasil berhasil guna. Amin Tunggal Wijaya (1989:212) Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah program yang dijalankan berhasil dan berdaya guna bagi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

b. Efektivitas Dana Desa

J. Koho Riwu (1989:212) Desa sebagai salah satu entitas pemerintahan terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Desa juga sebagai sebuah kesatuan masyarakat dengan berbagai macam variasi pola kehidupan maka perlu dikaji secara seksama rencana pembangunan supaya dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Dewasa ini pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka pembangunan di desa. Kemajuan Negara harus dipahami dengan pembangunan manusia dan infrastruktur dari desa karena menyiapkan sumber daya manusia dari desa akan secara keseluruhan terberdayakan dengan optimal.

Edi Suharto (2010:59-59) Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan dalam bentuk dana Inpres Bantuan Desa. Kebijakan ini menjadi kebijakan strategis dalam rangka membangun desa. Membangun dalam makna pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Pemberdayaan adalah suatu proses untuk menjadikan masyarakat atau kelompok lemah lebih berdaya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lemah menjadi lebih baik. Dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan desa, sehingga mereka

memiliki kebebasan, bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kemiskinan dan kebodohan. Dalam hal ini, pemberdayaan tidak terlepas dari kekuasaan karena dalam kekuasaan ada *power* sehingga ide Utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan atau pemerintah desa. Selama ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa maka menjadi sebuah tanggung jawab besar pengelola dana desa untuk lebih teliti dalam pengelolaannya. Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa dalam otonomi daerah sangat penting, dimana pemerintah daerah dituntut untuk membangun daerahnya sendiri dengan partisipasi penuh masyarakat.

Pemerintah Indonesia maupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pembangunan sepakat bahwa pembangunan pedesaan adalah sangat penting. Sejak masa Orde Baru melalui Pelita I sampai dengan sekarang pembangunan pedesaan telah dilaksanakan melalui pembangunan lembaga- lembaga pedesaan, pembangunan infrastruktur pedesaan serta kegiatan ekonomi sosial budaya. Pembangunan dilaksanakan dengan pola perencanaan dari pusat mengakibatkan tidak efektif hasil dari pembangunan serta kurang memberi mafaat kepada masyarakat setempat.

Pemerintah desa berhak merencanakan pembangunan dari desa untuk kemajuan desa. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pembangunan pedesaan sebagaimana yang dimaksud disusun oleh pemerintah desa dan partisipasi seluruh masyarakat desa. Dalam pembangunan desa, pemerintah dan masyarakat desa berpartisipasi dengan membentuk kolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena pemerintah dan masyarakat desa adalah dua pihak yang harus terlibat dalam pembangunan desa.

Pembangunan desa adalah impian seluruh masyarakat desa karena mempunyai dampak terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kemudian dapat memberi mamfaat secara berkesinambungan. Selama ini pembangunan banyak yang dilakukan secara mubazir tanpa tujuan yang jelas. Secara implisit dampak pembangunan harus berdampak kepada masyarakat meliputi dampak kepada pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berdampak kepada pembanguna infrastruktur yang tepat sasaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak pada pemberdayaan masyarakat yang secara utuh dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan

Supriyatna (1985:30) Efektivitas sebuah pembangunan juga dinilai dari hasil pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Berkelanjutan dengan maksud pembangunan yang dilakukan sesuai dengan pertisipasi masyarakat dan dapat dinikmati oleh

masyarakat secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dari berbagai pihak dan yang terpenting kontribusi masyarakat loka. Mubiyarto (1984:35) Partisipasi adalah ikut serta mengambil bagian dalam kegiatan bersama. Sedangkan dalam definisi lain juga berarti kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Rahardjo Adisasmita (2013:70) Dalam meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dibutuhkan :

- 1) Kepemimpinan lokal yang aspiratif ke bawah dan berwawasan kedepan pada pembangunan yang berkelanjutan.
- 2) Sosialisasi, pedampingan dan penguatan kelembagaan pendesaan.

Hal ini akan memberi dampak terhadap kualitas hidup masyarakat yang semakin lebih baik. Dana Desa selama ini yang lebih banyak difokuskan dalam bentuk fisik pada dasarnya melalui sebuah proses perencanaan yang matang yang disertai dengan partisipasi masyarakat sekitar. Didalam proses inilah masyarakat duduk bersama merumuskan apa yang menjadi program pembangunan dari dana desa yang didapatkan, partisipasi inilah yang menjadi salah satu titik awal keefektifan sebuah pembangunan bersama.

Siagian Sondang (2005:108) Pembangunan desa adalah “keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa”. Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Perencanaan adalah menyusun konsep sesuatu yang akan dikerjakan Perencanaan juga dapat dirtikan suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu KBBI(2008:195). Perencanaan mengandung tiga pilar utama yaitu.

- 1) Berhubungan dengan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat pada masa depan
- 2) Menyusun seperangkat kegiatan pembangunan secara sistematis
- 3) Dirancang untuk pembangunan tertentu.

Adisasmita (2013:14) Didalam merencanakan suatu pembangunan perlu menghitung dan menganalisis, membuat asumsi agar proyeksi tersebut dapat tercapai, yaitu pencapaian perbaikan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Perencanaan pembangunan wilayah pedesaan dianggap penting, karena kegagalan pembangunan wilayah dan pendesaan akan mengakibatkan dampak negatif terhadap pembangunan secara keseluruhan, seperti derasnya migrasi penduduk yang berlebihan dari desa pindah keperkotaan. Kecenderungan seperti ini semakin

meningkat, sehingga ketimpangan antar daerah pedesaan dengan wilayah perkotaan menjadi semakin tinggi.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa sebuah program akan menjadi pembangunan yang unggul dan bermamfaat terhadap masyarakat apabila ada partisipasi serta perencanaan yang matang dari masyarakat. Bermula dari proses ini maka dana yang disalurkan tidak akan sia-sia. Pembangunan yang berdasar dari Dana Desa akan menjadi pembangunan yang sangat penting karena pembangunan di dalam komunitas masyarakat memerlukan pembangunan untuk memacu kehidupannya yang lebih baik.

Pada dasarnya pembangunan desa sudah dimasukkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). Dengan demikian haruslah diawali dari partisipasi masyarakat yang menikmati pembangunan itu sendiri.

Dewasa ini desa lebih banyak menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan MCK, Jalan desa, saluran air, kantor desa, kantor PKK dan lain sebagainya. Pembangunan fisik ini terkadang tidak berimbang dengan kemauan masyarakat pada umumnya hal diakibatkan dari perencanaan pembangunan yang tidak partisipatif dan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada dalam satu wilayah desa penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri. Tidak berimbangnya hasil pembangunan dengan harapan masyarakat kerap kali diakibatkan oleh sebagian tim dari desa yang menjadi panitia dalam proses pembangunan desa tidak menyepakati rencana dari pembangunan tersebut. Kendala lain yang juga sering terjadi adalah masyarakat umumnya malas untuk terlibat aktif dalam perencanaan program pembangunan sehingga apa yang menjadi harapannya tidak tersampaikan dengan baik kepada tim perancang pembangunan desa.

Dalam skala wilayah desa pada dasarnya prospek pembangunan dapat dilakukan dengan tidak terlalu sulit, karena cakupan desa tidak besar dan rencana pembangunan tidak terlalu rumit. Mengidentifikasi pembangunan dapat dilakukan dengan pola partisipatif dengan ikut serta seluruh masyarakat yang ada guna terciptanya pembangunan yang ideal. Dana desa akan menjadi efektif dan terukur sesuai dengan kebutuhan masyarakat apabila pola partisipatif dilakukan. Dengan demikian harapan masyarakat dalam jangka panjang akan menjadi terwujud serta akan terberdaya dengan pembangunan ekonomi yang maksimal.

Inilah yang mewujudkan sebuah pembangunan yang ideal serta efektif dan dapat digunakan oleh masyarakat secara maksimal. Pembangunan tidak semata-mata hanya siap secara administrasi, akan tetapi dapat terukur dengan pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat setempat. Pembangunan dari dana desa yang efektif akan membantu pemerintah daerah serta pemerintah pusat dalam pembangunan nasional

seperti yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dana Desa yang efektif juga akan menumbuhkembangkan potensi ekonomi dalam masyarakat sekitar. Menumbuhkan sumber daya manusia yang mandiri secara ekonomi dan sosial, karena infrastruktur penunjang sudah ada dalam kebutuhan masyarakat.

6. Ukuran Efektivitas

Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

- a. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
- b. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
- c. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan.
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
- e. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- f. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
- g. Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- h. Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

7. Tujuan Efektivitas

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena peneliti secara mendalam ingin mengungkapkan fenomena yang akan diteliti dengan kata kata dari hasil wawancara maupun dari sumber-sumber yang lain yang digunakan oleh peneliti.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pada dasarnya peneliti ingin mengungkapkan fakta dengan melihat, mengamati dan terjun langsung lapangan penelitian dari fenomena yang terjadi di daerah tersebut . Sebagaimana dalam penelitian ini akan dibahas mengenai efektivitas penggunaan dan Desa di Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Peneliti akan terjun langsung mengamati atau mengobsevasi secara langsung dan mengambil data dengan melakukan wawancara.

B. Lokasi Dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Desa Leppangeng Kecamatan Ajanagle Kabupaten Bone. Penulis memilih lokasi ini karena ingin memastikan bahwa masyarakat pada Desa tersebut telah ikut berperan aktif dalam menggunakan dan mengawasi penggunaan anggaran dana Desa, Kemudian waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus 2019.

C. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini dibutuhkan data primer dan skunder guna memahami permasalahan. Sumber data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari setiap informan yang diamati atau diwawancarai dilokasi penelitian, dalam hal ini pemerintah Desa dan tokoh masyarakat di Desa Leppangeng.

D. Informan Penelitian

Teknik penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dengan cara memilih orang tertentu (informan key) dengan pertimbangan akan memberikan data yang diperlukan.

Untuk menentukan informan yang akan menjadi sasaran penelitian ini akan dipilih dengan teknik purposive sampling yaitu, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Peneliti akan mengambil informan untuk dijadikan sampel sebanyak 10 orang dalam penelitian ini pada Pemerintah Desa Leppang Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Sekertaris Desa
3. Ketua BPD
4. Kepala Dusun
5. Toko masyarakat
6. Masyarakat

E. Instrumen Penelitian

Instrumen utama yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan dan memilih informan sebagai sumber data, namun juga dibantu alat seperti perekam suara, dan kamera guna kelengkapan yang dibutuhkan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan yang telah ditentukan yaitu Desa Leppang Kecamatan Ajangale untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini. Adapun tehnik pengumpulan data yang ditempuh :

1. Observasi

Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan instrument lembar pengamatan yang bertujuan untuk memperoleh data tentang efektivitas penggunaan Dana Desa di Leppang

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan dua orang atau lebih. Dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan secara langsung informasi yang diperlukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden untuk dijawab. Adapun yang menjadi responden untuk diwawancarai adalah

kepala desa, sekretaris desa, ketua tim pelaksana pembangunan dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Menurut Nasir dalam Bukunya Metode Penelitian menyebutkan dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan data tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termaksud juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan berdasarkan tema penelitian. Metode ini membantu penulis dalam untuk mendapatkan data yang berbentuk dokumen.

G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa data yang telah didapatkan di lapangan kemudian diolah sesuai dengan keperluan dari penelitian baik ditabulasi ataupun diberi kode sesuai kebutuhan. Data yang didapatkan dari observasi disiapkan untuk menganalisa hasil dari data terkumpul melalui wawancara dan. Data yang didapatkan dari wawancara diolah untuk menambah bahan dari paparan hasil penelitian.

Setiap data yang didapatkan di lapangan dikerucutkan sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam tulisan ini. Seluruh temuan dideskripsikan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian deskriptif dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mensintesis semua jawaban tersebut dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan penelitian secara keseluruhan.

Pola di atas dilakukan untuk mengetahui hasil penelitian tentang efektivitas penggunaan dana desa di Desa Leppangeng kecamatan Ajangale.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa

Asal muasal nama desa Leppangeng, Raja Bone Lapawawoi Karaeng Sigeri dalam perjalanannya ke Sigeri singah bersama bala tentaranya di sebuah hutan belantara, seorang bala tentaranya bertanya, wahai Tuan Raja nama daerah ini bernama apa?, dan Raja Lapawawoi Karaeng Sigeri menjawab, karena kita singgah disini, maka nama dari daerah ini adalah Leppangeng atau dalam Bahasa Indonesia adalah Persinggahan, maka itulah asal muasal penamaan desa Leppangeng.

Sejarah Desa Leppangeng, desa Leppangeng dulunya adalah wilayah Desa Timurung, dan baru dimekarkan atau menjadi Desa baru yang diberi nama Desa Leppangeng pada tahun 1989 dan belum berstatus desa Defenitif. Setelah berstatus Defenitif pada tahun 1992, desa tersebut Dijabat pertama kali oleh A. Abd Rahman (Almarhum) pada tahun 1992. Pada tahun 1994 diadakan Pemilihan Kepala Desa Defenitif sesuai dengan ketetapan Pemerintah Pusat. Dan pada tahun 1994 diadakan Pemilihan kepala desa pertama di Desa Leppangeng dengan terpilihnya Muh. Basri Duke sebagai Kepala desa pertama, Muh. Basri duke menghabiskan 2(dua) periode dalam roda pemerintahannya dari tahun 1994 sampai pada tahun 2010. pada tahun yang sama kembali masyarakat Desa leppangeng melakukan Pemilihan Kepala Desa untuk dan terpilihlah Hj. Suharti, S.Sos sebagai kepala Desa Leppangeng Periode tahun 2010- 2016. Dengan berakhirnya Periode Pemerintahan Pada tahun 2016 dan untuk menghindari kekosongan Pemerintahan Desa, berhubung periode Pemerintahan Hj.Suharti,S.Sos telah berakhir maka ditunjuklah saudara (i) ST.Hajerah sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa oleh Pemerintah Kabupaten Bone yang menjabat hingga akhir tahun 2016 (30 Desember 2016). Setelah dilakukan Pemilihan Kepala Desa Serentak terpilihlah Saudara(i) Hj.Suharti,S.Sos Sebagai Kepala Desa terpilih untuk periode keduanya yang menjabat dari tahun 2017-2022.

Itulah sejarah singkat Desa Leppangeng mulai dari dimekarkan menjadi Desa baru bernama Leppangeng dan sampai sekarang menjadi Desa yang berkembang di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.

Desa Leppangeng merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Ajangale. Desa ini terletak di antara $120^{\circ} 7' \text{ BT}$ - $120^{\circ} 15' \text{ BT}$ dan $3^{\circ} 7' \text{ LS}$ - $3^{\circ} 10' \text{ LS}$. Desa Leppangeng ini terbagi atas 3 dusun dan 9 RT, yakni 4 RT di Dusun Tanete, 3 RT di Dusun Maccading, dan 2 RT di Dusun Bentengnge.

b. Batas Desa

Desa Leppangeng merupakan salah satu desa dari 14 (Empat belas) desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Ajangale. yang terletak ± 11 (Sebelah) km dari ibukota Kecamatan dan ± 57 km dari ibukota Kabupaten Bone. Wilayah Desa Leppangeng dapat dicapai dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Luas wilayah Desa Leppangeng sekitar 990,009 Ha

Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone juga memiliki batas oleh beberapa desa tetangga, secara rinci dijelaskan dibawah:

- 1) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ammassangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan desa Timurung Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Laponrong Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone
- 4) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sanrangeng Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

Secara lebih luas desa Leppangeng dikelilingi oleh persawahan dan jalan poros pompanua tacipi sehingga desa Leppangeng menjadi akses yang sering dilalui oleh para masyarakat yang akan dan ke Pompanua Ajangale, dan Kabupaten Sengkang.

c. Demografi

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 1545 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 830 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 825 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Dusun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1.TANETE	403	421	824
2.MACADING	420	479	899
3.BENTENGE	95	108	203
Total	918	1,008	1,926

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber Data : Kantor Desa Leppangeng 2019

Untuk lebih rinci mengenai pembagian penduduk menurut umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk berdasarkan Umur

Dusun	0-4		5-9		10-14		15-19		20-24	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1.TANETE	24	25	29	22	23	28	39	36	43	43
2.MACADIN G	29	35	36	33	40	31	40	37	37	52
3.BENTENG E	8	5	8	9	10	11	11	8	9	6
Total	61	65	73	64	73	70	90	81	89	101
Dusun	25-29		30-34		35-39		40-44		45-49	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1.TANETE	50	36	32	30	17	18	28	21	16	25

2.MACADIN G	44	34	32	32	37	37	26	30	13	19
3.BENTENG E	6	5	5	6	3	6	7	9	7	8
Total	100	75	69	68	57	61	61	60	36	52
Dusun	50-54		55-59		60-64		65>		Total	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1.TANETE	23	35	11	26	24	20	44	56	403	421
2.MACADIN G	22	53	23	11	12	12	28	63	419	479
3.BENTENG E	7	9	1	7	3	6	10	13	95	108
Total	52	97	35	44	39	38	82	132	917	1,008

Sumber : : Kantor Desa Leppangeng 2019

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Leppangeng.

- Belum Sekolah : 29 orang
- Usia 7 – 15 tahun tdk pernah sekolah : 78 orang
- Pernah sekolah SD tapi tidak tamat : 65 orang
- Tamat SD / sederajat : 59 orang
- Tamat SLTP / sederajat : 78 orang
- Tamat SD / sederajat : 96 orang
- Tamat D1 : 12 orang
- Tamat D2 : 0 orang
- Tamat D3 : 13 orang
- Tamat S1 : 12 orang
- Tamat S2 : 1 orang
- Tamat S3 : -
- Jumlah Sekolah TK : 1 unit
- PAUD : 1 unit
- Jumlah sekolah SD / sederajat : 1 unit
- Jumlah sekolah SLTP/ sederajat : 0 unit
- Jumlah sekolah SLTA/ sederajat : 0 unit
- Jumlah sekolah PT : 0 unit.

Selanjutnya keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian/pekerjaan dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini:

Tabel 1.4 .Jumlah penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase dari Total Jumlah Penduduk
1.	Petani	600	39,0
2.	Buruh tani	-	0,0
3.	PNS/TNI/POLRI	3	0,0
4.	Karyawan swasta	-	0,0
5.	Pedagang	3	0,0
6.	Wirausaha	10	1,0
7.	Pensiunan	1	0,0
8.	Tukang bangunan	4	0,0
9.	Peternak	400	26,0
10.	Lain-lain/tidak tetap	524	34,0
Jumlah			100 %

Sumber : : Kantor Desa Leppangeng 2019

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Leppangeng jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 19,0 %. Dari jumlah tersebut, kehidupannya bergantung di sektor pertanian, ada 39,0 % dari total jumlah penduduk..

Terbanyak kedua adalah peternak dengan 26,0 % dari total jumlah penduduk. Sementara penduduk yang lain mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda, ada yang berprofesi sebagai PNS, TNI, POLRI, pedagang, wiraswasta, tukang bangunan, dan lain-lain dalam skala kecil.

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di Desa Leppangeng memiliki alternatif pekerjaan selain sektor buruh tani dan petani. Setidaknya karena kondisi lahan pertanian mereka sangat tergantung dengan curah hujan alami. Di sisi lain, air irigasi yang ada tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di Desa Leppangeng secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau. Sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain

Keadaan penduduk berdasarkan kepemilikan akte kelahiran dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut ini :

Tabel 1.5. Jumlah Penduduk berdasarkan Kepemilikan Kartu Keluarga

Dusun	Kepemilikan KK		
	Ada	Tidak Ada	Total
1.TANETE	151	35	186
2.MACADING	71	99	170
3.BENTENGE	45	-	45
Total	267	134	401

Sumber Data : Kantor Desa Leppangeng 2019

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, maka dapat kita ketahui bahwa ada 64 KK yang belum memiliki Kartu Keluarga.

C . Kondisi Sosial

Untuk mengetahui gambaran kondisi sosial masyarakat Desa Leppangeng, dapat dilihat melalui aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek keamanan dan ketertiban, aspek keagamaan, aspek kesenian dan olah raga serta kehidupan gotong royong masyarakat yang merupakan ciri khas masyarakat desa yang tetap tumbuh dan berkembang.

Kondisi Desa Leppangeng dari aspek pendidikan dapat digambarkan berdasarkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.6. Sarana Pendidikan di Desa Leppangeng

Dusun	Taman Paditunga	TK/ RA	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA/SMK /SMA	Taman bacaan
1.TANETE	1	-	1	-	-	-
2.MACADING	-	1	1	-	-	-
3.BENTENGE	-	-	-	-	-	-
Total	1	1	2	-	-	-

Sumber Data : Kantor Desa Leppangeng 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Leppangeng berjumlah 1 TK dan 1 TP serta 2 SD. Hal ini menunjukkan bahwa sarana pendidikan masih kurang dan masyarakat yang akan melanjutkan kejenjang SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat harus ke ibukota kecamatan.

Dari aspek kesehatan, kondisi Desa Leppangeng dapat digambarkan berdasarkan sarana kesehatan, tenaga kesehatan dan hal lainnya yang menggambarkan pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Leppangeng.

Tabel 1.7. Prasarana Kesehatan di Desa Leppangeng

Dusun	Puskesmas	Pustu	Polindes	Posyandu
1.TANETE	-	-	-	1
2.MACADING	-	-	1	1
3.BENTENGE	-	-	-	-
Total	-	-	1	2

Sumber Data : Kantor Desa Leppangeng 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Prasarana Kesehatan yang ada di Desa Leppangeng masih sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan perawatan yang intensif, masyarakat harus ke ibukota kecamatan untuk mendapatkan perawatan. Hal tersebut diakibatkan karena peralatan-peralatan poskesdes masih belum lengkap dan tenaga medis di desa masih kurang.

Tabel 1.8. Pengelola Sarana dan Prasarana di Desa Leppangeng

Dusun	Pasar	Lapangan Olahraga	Tempat Sampah Umum	MCK Umum
1.TANETE	-	-	-	-
2.MACADING	-	-	-	-
3.BENTENGE	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Sumber Data : Kantor Desa Leppangeng 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pengelola sarana prasarana kesehatan di desa Leppangeng masih kurang sehingga membutuhkan banyak tenaga kesehatan yang berpengalaman dan kader-kader kesehatan yang dapat membantu Bidan/Perawat untuk melayani masyarakat khususnya di bidang kesehatan.

Kondisi aspek keamanan dan ketertiban Desa Leppangeng dapat digambarkan berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana poskamling, partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Desa Leppangeng memiliki poskamling semi permanen sebanyak 3 unit dan petugas keamanan desa (Linmas) sebanyak 6 orang.

Tabel 1.9. Sarana Peribadatan

Dusun	Mesjid	Gereja	Pura	Wihara
1.TANETE	1	-	-	-
2.MACADING	1	-	-	-
3.BENTENGE	1	-	-	-
Total	3	-	-	-

Sumber Data : Kantor Desa Leppangeng 2019

Kondisi keagamaan di Desa Leppangeng dapat digambarkan berdasarkan sarana peribadatan yang ada, pelaksanaan aktivitas keagamaan dan toleransi kehidupan beragama. Sarana peribadatan yang ada di Desa Leppangeng yaitu masjid sebanyak 3 buah.

Penduduk Desa Leppangeng seluruhnya beragama Islam. Pelaksanaan kegiatan perayaan keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha dan peringatan hari-hari besar agama Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj serta ibadah bulan Ramadhan seluruhnya. Hal ini adalah sebagai bentuk kerjasama yang baik antara masyarakat dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Desa Leppangeng, seperti Remaja Masjid, BKMT dan pantia hari-hari besar Islam.

D. Kondisi Ekonomi

Untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi di Leppangeng, peneliti juga mencari informasi terkait dengan kondisi ekonomi yang terjadi pada Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, Kondisi Ekonomi di desa Leppangeng dapat digambarkan secara umum pada keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Leppangeng Kecamatan Akangale Kabupaten Bone. Adapun keadaan penduduk Desa Leppangeng berdasarkan mata pencaharian dan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 1.10 di bawah ini:

Tabel 1.10. Jumlah penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase dari Total Jumlah Penduduk
1.	Petani	600	39,0
2.	Buruh tani	-	0,0
3.	PNS/TNI/POLRI	3	0,0
4.	Karyawan swasta	-	0,0
5.	Pedagang	3	0,0
6.	Wirausaha	10	1,0
7.	Pensiunan	1	0,0
8.	Tukang bangunan	4	0,0
9.	Peternak	400	26,0
10.	Lain-lain/tidak tetap	524	34,0
Jumlah			100 %

Sumber Data : Kantor Desa Leppangeng 2019

Berdasarkan tabel 2.10 di atas, maka dapat kita ketahui bahwa ada sebagian besar penduduk Desa Leppangeng menggantungkan hidupnya sebagai Petani yakni 600 Orang dan sebagian besar penduduk belum/ Tidak bekerja yakni 524 Orang.

Terbanyak kedua adalah peternak dengan 26,0 % dari total jumlah penduduk. Sementara penduduk yang lain mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda, ada yang berprofesi sebagai PNS, TNI, POLRI, pedagang, wiraswasta, tukang bangunan, dan lain-lain dalam skala kecil.

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di Desa Leppangeng memiliki alternatif pekerjaan selain sektor buruh tani dan petani. Setidaknya karena kondisi lahan pertanian mereka sangat tergantung dengan curah hujan alami. Di sisi lain, air irigasi yang ada tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di Desa Leppangeng secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau. Sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.

Sedangkan untuk mengetahui potensi yang dihasilkan di Desa Leppangeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.11. Potensi, Komoditas dan Pemasarannya

NO	POTENSI	KOMODITAS	PEMASARAN
A.	PERTANIAN :		
1	Tanaman Pangan	Padi, Jagung, Kacang tanah, Singkong, Ubi Jalar, Cabe dan Tomat.	pemasaran hasil pertanian, peternakan
2	Perkebunan	Jeruk, Mangga, Pisang, Kelapa, coklat	Langsung ke Konsumen, pasar
B.	PETERNAKAN	Sapi, ayam kampung, Ayam Petelur, Ayam Putih, kuda, dan kambing,	dan pengecer, sedangkan Bahan galian dari luar desa
C.	TAMBANG/BAHAN GALIAN	Pasir Merah, Sirtu	langsung ke konsumen.

Sumber Data : Kantor Desa Leppangeng 2019

Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Leppangeng, dapat dilihat melalui beberapa ukuran, antara lain tingkat kemiskinan. Jumlah KK di Desa Leppangeng yang menerima Raskin sebanyak Orang, pemegang KPS/KIS/KIP sebanyak \pm Jiwa. Dengan tingkat kemiskinan masyarakat tersebut,berimplikasi terhadap tingkat kehidupan masyarakat. Namun demikian untuk mengetahui kondisi riil masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.12. Sumber Air Minum berdasarkan Kepala Keluarga

Dusun	Sumber Air Minum						Total
	Air Kemasan	Air PDAM	Air Sumur	Air Sungai	Mata Air	Air Hujan	
1.TANETE	1	8	90	37	31	19	186
2.MACADING	1	-	-	169	-	-	170
3.BENTENGE	2	1	24	-	18	-	45
Total	4	9	114	206	49	19	401

Sumber Data : Kantor Desa Leppangeng 2019

Berdasarkan dari data pada tabel diatas dapat diketahi bahwa sebagian besar masyarakat Desa Leppangeng menggunakan Air Sungai dan Air Sumur dan akan tetapi ternyata masih ada 19 Kepala Keluarga yang menggunakan air hujan sebagai Sumber Air Minum.

Tabel 1.13. Jenis Jamban berdasarkan Rumah Tangga/Kepala Keluarga

Dusun	Jenis Jamban			Total
	Leher Angsa	Plengsengan / Cemplung	Tidak Punya	
1.TANETE	70	8	108	186
2.MACADING	90	21	59	170
3.BENTENGE	1	21	23	45
Total	161	50	190	401

Sumber Data : Kantor Desa Leppangeng 2019

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa masih banyak Kepala keluarga belum memiliki Jamban yakni 190 KK. Hal tersebut dapat berimplikasi pada pencemaran lingkungan dan dapat membawahkan wabah penyakit.

Dari beberapa data yang ditunjukkan dalam Tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak permasalahan ekonomi masyarakat yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan sentuhan pembangunan oleh pemerintah Desa Leppangeng.

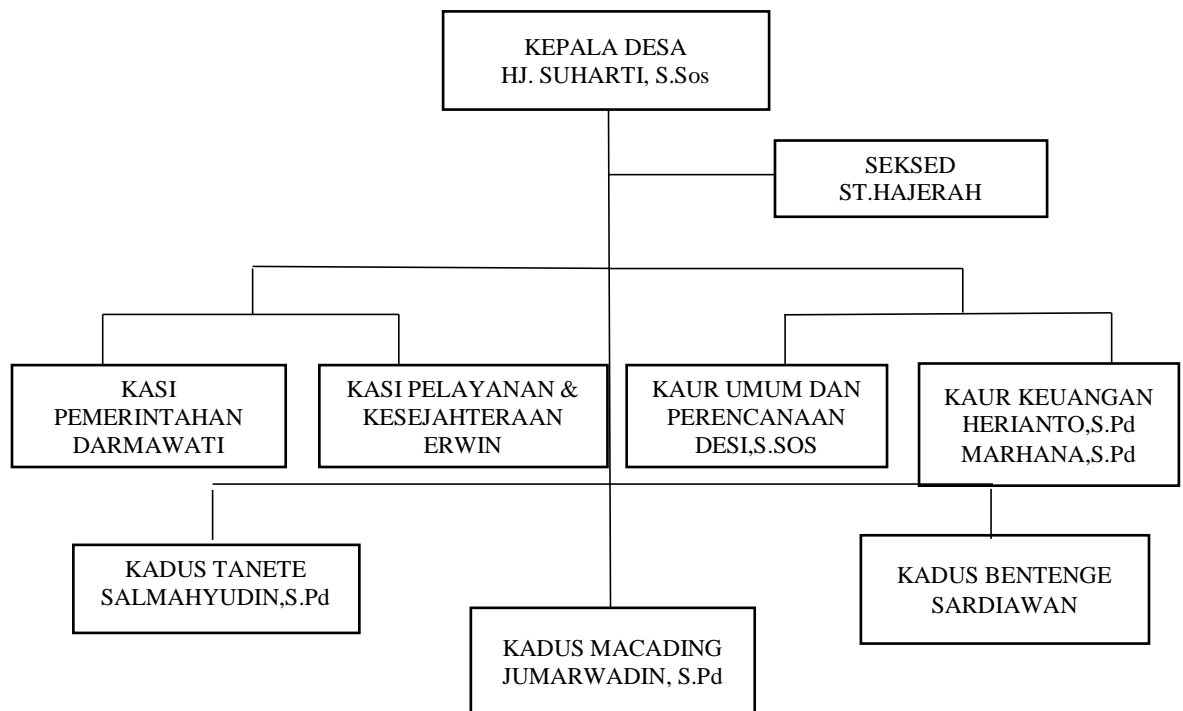
E. Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk desa Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone adalah 1.813 jiwa. Penduduk memiliki mata pencaharian petani, dan pekebun, hal ini sesuai dengan letak desa yang dikelilingi oleh persawahan produktif. Selain memiliki mata pencaharian di atas, sebagian besar masyarakat Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone juga bergelut sebagai peternak sapi. Sebagian besar perempuan desa Leppangeng juga berprofesi sebagai Petani, karna ikut serta membantu keluarga mereka untuk mengurus sawah mereka.

F. Struktur Organisasi Desa

Struktur Organisasi desa Mee adalah sebagai berikut :

Struktur organisasi Desa Leppangeng



Gambar 1.2 Struktur organisasi Desa Leppangeng

Sumber Data : Kantor Desa Leppangeng 2019

2. Efektifitas Penggunaan dana desa di desa Leppangeng Kecamatan Ajangale

Esensi dari sebuah pembangunan adalah berdaya guna bagi yang menikmati pembangunan itu sendiri. Dari dasar inilah penelitian dilakukan di Desa Leppangeng kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dalam rangka melihat efektivitas pembangunan desa yang besumber dari dana desa. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi lapangan, wawancara serta dokumentasi yang berlangsung di Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.

Anggaran Dana yang dikucurkan oleh pemerintah Kabupaten Bone untuk Desa Leppangeng pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 608.807.000. Tahun 2017 sebesar Rp. 775.331.000. Sedangkan pada tahun 2018 dana yang dikucurkan oleh pemerintah sebesar Rp. 975.136.000. Dalam proses penggunaan dana tersebut terjadi kelebihan anggaran sehingga dilakukan dana sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebanyak Rp. 27.009.000. Sehingga anggaran yang digunakan dalam tahun 2018 adalah sebesar Rp. 948.127.000.

Adapun infrastruktur yang dibangun desa leppangeng dan menggunakan dana desa pada tahun 2016 sebanyak Rp. 608.807.000. adalah sebagai berikut :

Tabel 1.14. Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

No.	Nama Kegiatan	Dana yang digunakan
1.	Kegiatan pembangunan Talud dan perkerasan sebanyak 500M	Rp. 200.000.000
2.	Kegiatan pembangunan paving block	Rp. 110.000.000
3.	Kegiatan pembangunan jamban Keluarga sebanyak 90 unit jamban keluarga	Rp. 133.500.000
4.	Kegiatan pembangunan pos yandu	Rp. 80.000.000
5.	Pembangunan plavon PAUD	Rp. 50.000.000
6.	Pengadaan mobile PAUD	Rp. 10.000.000
7.	Pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan	Rp. 15.307.000
8.	Kegiatan peningkatan kapasitas perintah desa	Rp. 10.000.000
JUMLAH		Rp. 608.807.000

Sumber Data : Kantor Desa Leppangeng 2019

Sedangkan pada tahun 2017, Desa leppangeng menerima dana desa dari pemerintah sebanyak Rp. 775.331.000. Adapun infrasteuktur yang dibangun desa leppangeng dan pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.15. Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

No.	Nama Kegiatan	Dana Yang digunakan
1.	Pembangunan Talud dan perkerasan jalan dusun tanete volume 400M	Rp. 193.800.000

2.	Pembangunan Drainase & selasan Dusun Tanete volume 100M	Rp. 186.800.000
3.	Kegiatan pembangunan paving block dusun maccading 170M	Rp. 130.500.000
4.	Pembangunan jamban keluarga sebanyak 80 KK	Rp. 166.600.000
5.	Pengadaan instalasi listrik gedung paud	Rp. 6.500.000
6.	Intensif kader pos yandu	Rp. 7.200.000
7.	Kelengkapan administrasi popja desa sehat	Rp. 3.031.000
8.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Rp. 9.900.000.
9.	Pelatihan siskudes	Rp. 5.000.000
10.	Pelatihan kader teknik	Rp. 3.000.000
11.	Peningkatan kapasitas pengelolaan Bumdes	Rp. 10.000.000
12.	Musyawarah desa untuk pertanggung jawaban serah terima hasil pembangunan desa	Rp. 3.000.000
13.	Modal Bumdes	Rp. 50.000.000
Jumlah		Rp. 775.331.000

Sumber Data : Kantor Desa Leppangeng 2019
Pada tahun 2018 Desa Leppangeng mengelola dana desa sebesar Rp. 948.127.000

Tabel 1.16. Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

No.	Nama Kegiatan	Dana Yang digunakan
1.	Perintisan jalan tani dusun tanete	Rp. 27.009.000
2.	Pembangunan Plat Duiker dusun Tanete	Rp. 21.160.000
3.	Printisan Jalan tani dusun bentenge	Rp.43.734.000
4.	Perkerasan jalan dusun tanete	Rp. 122.809.000
5.	Pembangunan Talud dusun tanete 1000 M	Rp. 135.978.000
6.	Timbunan Talud dusun maccading 500 M	Rp. 117.430.000
7.	Pembangunan Talud paving block dusun macading 340 M	Rp. 38.198.000
8.	Pembangunan Jalan paving block dusun macading 170 M	Rp. 141.913.000
9.	Pengadaan pembangunan jaringan internet dan website desa	Rp. 13.000.000
10.	Pembangunan Talud dusun maccading 1000M	Rp. 122.705.000
11.	Pembangunan dan pemeliharaan jambanisasi & mandi cuci kakus	Rp. 17.600.000

12.	Alat Kesehatan	Rp.1.300.000
13.	Pembangunan dan pemeliharaan lingkungan pemukiman	Rp. 44.100.000
14.	Pembangunan dan perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin	Rp. 60.000.000
15.	Modal Bumdes	Rp. 40.000.000
16.	Bantuan kader pos yandu	Rp. 9.000.000
17.	Pelatihan kader kesehatan	Rp .3.500.000
18.	Bantuan intensive guru paud	Rp. 6.000.000
19.	Penyelenggara musyawarah Desa	Rp. 2.200.000
20.	Pelatihan kader KPMD	Rp. 3.500.000
21.	Pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa	Rp. 4.000.000
22.	Silpa (siswa lebih perhitungan anggaran)	Rp. 27.009.000.
JUMLAH		Rp. 948.127.000.

Sumber Data : Kantor Desa Leppangeng 2019

Anggaran pendapatan belanja Desa Leppangeng Dari keseluruhan dana yang ada disusun empat bidang program seperti yang tersebut dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Leppangeng. Keempat bidang program tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Leppangeng
Bidang ini memerlukan dana 20 % dari total anggaran yang disediakan. Bidang ini lebih fokus pada belanja pegawai dan operasional Desa Leppangengeng serta sistem administrasi Desa leppangeng .
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Leppangeng
Bidang ini merupakan bidang prioritas yang hampir 64 % dari semua total anggaran digunakan untuk pembangunan.
- 3) Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Leppangeng
Bidang ini menyerap 5 % dari total anggaran yang ada.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Leppangeng
Anggaran dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang ini hanya mencapai 10 % saja dari dana desa yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan dana desa untuk pembangunan banyak di anggarkan mencapai 64 % dari pada untuk pemberdayaan dalam bidang ekonomi produktif. Infrastruktur menjadi penting karena dulu pembangunan masih sangat minim sehingga masyarakat masih menggunakan bangunan lama yang terkadang sudah tidak layak lagi untuk digunakan.

Menurut salah seorang masyarakat bernama Basri menyatakan bahwa pembangunan yang berdasrakan dari dana desa banyak melakukan pembangunan fisik untuk kebutuhan desa seperti perbaikan bangunan serta jalan kampung, dan jalan tani.(Hasil Wawancara 24 Juli 2019) .

Disisi lain penulis juga mewawancarai Kepala BPD Desa Leppangeng Andi Usba. Menurut Andi Usba Pembangunan Desa lebih diutamakan untuk pembangunan fisik yang signifikan sehingga pembangunan fisik terus dipacu. Perkembangan pembangunan infrastruktur desa Leppangeng pada dasarnya ada peningkatan, meskipun terkadang saat pengerjaan proyek terjadi perubahan cuaca yang mengakibatkan tersendatnya proses pembangunan.(Hasil Wawancara Tanggal 23 Juli 2019).

Menurut sekretaris desa St. Hajerah pembangunan sangat terasa berkembang setelah adanya dana desa dengan. . St. Hajerah menambahkan pembangunan tidak memiliki hambatan yang berarti sehingga pelan-pelan pembangunan tercipta sesuai harapan warga.(Hasil Wawancara 23 Juli 2019).

Dapat disimpulkan paparan tokoh masyarakat serta warga Desa Leppangeng dapat disimpulkan bahwa pemabangunan desa baru dimulai 25 tahun terakhir dan berjalan maksimal dalam 5 tahun ini dengan dana dari berbagai sumber yang ada seperti, Program Bumdesa (Badan Usaha Milik Desa). Pembangunan cukup efektif untuk menambah pendapatan desa Leppangeng wujud dari pembangunan desa.

Mengenai dana Desa yang selama ini diberikan oleh pemerintah penulis melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat dan warga. Menurut bapak Basri, dana yang bersumber dari Dana Desa .selama ini digunakan untuk membangun sejumlah sarana infrastruktur dalam rangka kemajuan desa seperti pembangunan jalan desa, pembangunan MCK, Pembangunan saluran pembuangan desa, pembangunan kantor desa, dan pembukaan jalan areal persawahan. (Hasil Wawancara 24 Juli 2019). Menurut bapak Basri pembangunan selama ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur karena belum banyak infrastruktur yang ada di desa Leppangeng.(Hasil Wawancara 24 Juli 2019) .

3. Perbedaan Antara Hasil yang Diharapkan dengan Wujud Nyata Infrastruktur yang Dibangun

Seperti dikemukakan diawal dalam rangka mengukur sebuah program efektif atau tidak maka salah satu cara adalah dengan melihat dampak dari pembangunan kepada masyarakat yang menikmati pembangunan. Sesuai dengan pengertian efektif yaitu hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu yang benar, yang memenuhi misi suatu badan, lembaga, instansi, perusahaan atau pencapaian tujuan (Amin Tunggal : 1999).

Infrastruktur yang dibangun merupakan kebutuhan Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone yang telah menjadi prioritas masyarakat berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Dalam

rangka melihat efektivitas pembangunan desa dari dana yang bersumber dari APBDN penulis melakukan penelitian dengan melakukan observasi serta wawancara dengan perangkat desa masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat Basri mengungkapkan bahwa Dana Desa sangat membantu masyarakat, karena dengan adanya dana desa yang diterima masyarakat Leppangeng dapat membangun infrastruktur seperti perintisan jalan, Jalan tani perkerasan dan talud, yang dulunya masyarakat Leppangeng susah menjangkau area persawahan mereka dengan menggunakan kendaraan untuk mengangkut hasil pertanian (Hasil Wawancara 24 Juli). Apa yang disampaikan oleh Bapak Basri di atas akan menjadi pembandingan dengan hasil pembangunan yang selama ini dilakukan oleh tim pelaksana yang diketuai oleh Bapak Bukhari.

Menurut Salmanyudin, Kepala Dusun di Desa Leppangeng menyebutkan bahwa pembangunan selama ini dilakukan untuk peningkatan jalan tani, pemabngunan MCK, pembangunan gedung PAUD dan pembenahan kantor Desa. Tahun 2016 infrastruktur yang dibangun adalah Pos Yandu, pembangunan jamban keluarga dan pengadaan lampu jalan, pemeliharaan lampu jalan, dan lain-lain. Item pembangunan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat sangat puas dengan hasil pembangunan ini(Hasil Wawancara 24 Juli 2019). Sebagai bahan pembandingan penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat mengenai hasil pembangunan yang telah dilakukan di desa. Menurut Asmayanti pembangunan infrastruktur selama ini telah banyak berubah terlebih setelah ada dana desa, dan hasil pembangunannya cukup bagus dan memuaskan. (Hasil Wawancara 23 Juli) .Mistang seorang petani mengungkapkan bahwa selama ini pembangunan yang dilaksanakan yang bersumber anggaran dari Dana Desa diperuntukkan untuk membangun perintisan dan perkerasan jalan tani dan gedung Paud, Pembenahan Kantor Desa, dan Pembangunan Pos yandu (Hasil Wawancara 24 Juli 2019).

Hasil observasi penulis pembangunan ini dilakukan atas dasar kebutuhan masyarakat di bidang pertanian seperti jalan tani agar masyarakat desa Leppangeng lebih gampang untuk mengangkut hasil pertanian mereka menggunakan sebuah kendaraan.

Berkaitan dengan keterlibatan masyarakat penulis juga melakukan wawancara dengan kepala desa Ibu Suharti, menurutnya setiap tahapan yang diprogramkan diawali dengan rapat bersama seluruh masyarakat sehingga pembangunan yang dilakukan di tahun anggaran tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Kesepakatan bersama masyarakat merupakan kunci untuk suksesnya membangun desa (Hasil Wawancara 22 Juli 2019). Menurut Bapak Salmanyudin rencana pembangunan biasanya jauh-jauh hari sudah direncanakan dan hanya menunggu dananya keluar sehingga bisa dikerjakan secara bergiliran (Hasil Wawancara 24 Juli 2019).

B. PEMBAHASAN

Dari paparan beberapa warga yang telah diwawancarai mengenai Alokasi Dana Desa dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang berasal dari dana desa telah dibangun beberapa bangunan yang strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Walaupun lebih banyak bangunan fisik namun semata-mata pembangunan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti MCK, Peningkatan Jalan, Saluran Pembuangan dan Lain-lain.

Penulis juga melakukan observasi secara mendalam mengenai pembangunan yang selama ini dilakukan oleh tim pelaksana Dana Desa di Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Seluruh bangunan yang telah dibangun ini memiliki kualitas yang baik terbukti dari keadaan bangunan yang tidak mudah rusak seperti bangunan saluran pembuangan air atau got yang menjadi kebutuhan masyarakat sudah sangat lama dan baru terwujud dalam tiga tahun ini.

Dalam tulisan ini penulis juga meneliti pola pemberdayaan dari dana Dana Desa. Salah satu warga yang diwawancarai berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan desa adalah Mistang mengungkapkan bahwa pembangunan desa tidak selalu pembangunan fisik akan tetapi juga menyentuh pembangunan ekonomi sehingga kedepan masyarakat dapat lebih sejahtera. Pembangunan selama ini lebih fokus pada fisik tidak salah akan tetapi kedepan pembangunan yang bersifat pemberdayaan juga harus digiatkan. (Hasil Wawancara 23 Juli 2019)

Menurut Erwin salah seorang masyarakat yang juga salah satu tokoh pemuda masyarakat. Menurutnya pembangunan infrastruktur bisa dikurangi dengan dilakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pemberian modal usaha kecil kepada masyarakat serta budidaya ternak sapi bibit unggul. (Hasil Wawancara 23 Juli 2014).

Asmaranti salah seorang tokoh perempuan desa Leppangeng menyebutkan pemberdayaan ekonomi dari dana Desa cukup penting terutama untuk ibu rumah tangga sebagai usaha sampingan seperti usaha kios dalam menambah pendapatan keluarga (Hasil Wawancara 23 Juli 2019).

Suriyani yang juga merupakan salah seorang warga yang mewakili kaum perempuan menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan hal yang penting dalam rangka keberlangsungan ekonomi warga Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Ekonomi masyarakat masih dibawah rata-rata dengan berprofesi sebagai petani. Didalam satu keluarga tambah Suriyani bisa dikembangkan sebuah unit pemberdayaan ekonomi yang memiliki kontribusi untuk keluarganya sendiri (Hasil Wawancara 23 Juli 2019).

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat dipahami bahwa pembangunan fisik memang diperlukan akan tetapi diharapkan juga

berimbang dengan pembangunan ekonomi yang bersifat pemberdayaan. Hal ini perlu berimbang sehingga pembangunan manusia juga dapat berimbang antara pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi menjadi penting dalam rentang waktu jangka panjang sehingga setiap kepala Keluarga memiliki taraf ekonomi yang mapan.

Berkaitan dengan efektifitas penulis lebih dahulu melihat pembangunan yang telah dilakukan tim dari aparat desa. Sebagai pembanding penulis juga melakukan observasi terhadap pembangunan yang sebelumnya. Pembangunan yang telah dilakukan seperti peningkatan beton jalan desa. Pembangunan MCK desa, PAUD, kantor Desa serta Pos Yandu` dan pembangunan lain. Umumnya semua yang menjadi prioritas pembangunan merupakan bangunan baru dan bangunan lama yang dibangun kembali serta ada juga yang direhab.

Menurut Erwin, salah satu warga menyebutkan bahwa semenjak dianggarkan dari dana desa Perdesaan lebih dulu dibangun peningkatan jalan serta Pembangunan Kantor Desa, Paud, saluran buangan, karena ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kala itu.

Jalan Tani dulunya masih sulit untuk di jangkau sehingga dikala musim hujan susah untuk melintasi jalan tersebut,. Demikian halnya dengan saluran pembuangan atau got. Setipa rumah tangga di Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone meletakkan saluran pembuangan di belakang rumah tanpa adanya saluran induk sehingga terkesan jorok dan sering menimbulkan bau yang menyengat dari pembuangan air limbah rumag tangga tersebut.

Dari observasi penulis pembangunan yang dilakukan selalu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya. Dari pemaparan hasil wawancara dan observasi di atas dapat dipahami bahwa pembangunan yang menjadi prioritas adalah yang utama dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan hajat hidup masyarakat yang lama tidak terlaksana dengan baik.

Tahun 2016 pembangunan diprioritaskan pada pembangunan fisik beberapa buah gedung untuk kebutuhan birokrasi desa, seperti pembangunan kantor desa, gedung PAUD dan, Pos Yandu dan lain lain. Pembangunan ini bertujuan untuk memperlancar birokrasi desa karena padatnya laporan pertanggung jawaban dana desa yang harus selesai tepat waktu..

Pembangunan ini memberi dampak yang cukup baik untuk masyarakat yang ingin mengurus berbagai keperluan. Penulis melihat ini berdampak baik karena dalam perencanaan pembangunan masyarakat dilibatkan samapai dengan proses pembangunan.

Berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses penggunaan anggaran dana desa penulis juga melakukan penelitian secara rinci dalam rangka mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Menurut Erwin salah seorang warga desa dan sebagai tokoh pemuda menyebutkan dari awal proses perencanaan diadakan rapat seluruh masyarakat untuk diputuskan hal-hal apa saja yang akan dibangun dan dijadikan prioritas dalam proses anngaran satu tahun

pertanggungjawaban, Erwin menambahkan dalam rapat di awal perencanaan juga dimusyawarahkan dan diputuskan pembangunan prioritas yang harus dikerjakan.

Menurut sekretaris Desa Leppangeng St. Hajerah Warga desa sebagian dilibatkan sampai dengan proses pelaksanaan dimana masyarakat juga sebagai pekerja dalam setiap item pekerjaan yang bersumber dari dana Desa. Ini menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat desa karena didominasi oleh petani yang pekerjaannya musiman (Hasil wawancara 23 Juli 2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam tahap perencanaan dan pekerjaan masyarakat dilibatkan secara keseluruhan dan mereka yang memiliki skill dalam bagian bangunan akan dipakai sebagai mandor pembangunan dana masyarakat ikut membantu. Uraian hasil wawancara dan observasi penulis berkaitan dengan efektifitas dana desa di atas dapat disimpulkan bahwa dana desa yang dikucurkan pemerintah setiap tahunnya untuk desa Meunasah Mee dipergunakan sesuai dengan harapan masyarakat dan efektif dalam membangun infrastruktur desa.

1. Pembahasan Efektivitas Dana Desa Leppangeng

Terkait proses Pengelolaan Dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Leppangeng kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, Pemerintah Desa Leppangeng terlebih dahulu menyusun tim pelaksana Dana Desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Selanjutnya, proses pengelolaan dana desa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

2. Efektivitas dalam proses perencanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan Pengelolaan Dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Leppangeng cukup efektif dimana dilakukan dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran dana desa serta bagaimana proses pengelolaan dana desa, dimana dalam tahapan perencanaan ini di ukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi masyarakat dalam proses musrembang desa. Meskipun Masyarakat yang ikut berpartisipasi masih belum banyak yang ikut dalam kegiatan musrembang, hanya beberapa masyarakat saja yang ikut serta dalam musrembang desa, masyarakat biasanya sibuk memikirkan aktifitas kerjanya, sehingga masyarakat menganggap semua urusan pemerintahan desa merupakan urusan para aparatur desa. sebaiknya masyarakat ikut serta dalam pengawasan pembangunan dan pengelolaan dana desa untuk sama sama mengawasi pembangunan desa yang bersumber dari dana desa ini.

3. Efektivitas Dalam Proses Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Leppangeng, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Leppangeng ini, dari setiap

pembangunan desa yang dilakukan dapat terselesaikan dengan baik sehingga pencapaian tujuan Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Leppangeng lumayan cukup efektif.

Dengan demikian tahapan pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Lakapodo berjalan dengan baik, akan tetapi walaupun proses pembagunan berjalan dengan baik namun tahapan pelaksanaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dari setiap kegiatan yang di adakan oleh pemerintah desa.

4. Efektivitas Dalam Proses Tahap Pertanggung Jawaban

Selanjutnya, tahapan pertanggung jawaban Pengelolaan dana Desa di Desa Leppangeng, hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan pertanggung jawaban sudah cukup efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disusun oleh Pemeintah Desa Leppangeng dengan baik dan rinci, dan sesuai dengan dana desa yang terima dan kelola desa Leppangeng. Maka tahapan petanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Leppangeng dapat dikatakan sudah cukup efektif.

5.Tujuan Ukuran Efektivitas

Terkait dalam efektivitas, Adapun tujuan peneliti dalam melakukan pengukran efektivitas yaitu sebagai berikut :

- a. Agar perencanaan pembangunan matang dan pelaksanaan yang terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, tetapi juga terigrentasi dan memberi manfaat bagi masyarakat.
- b. Untuk menimalisir terjadinya penggelapan dana desa dan agar masyarakat lebih mengerti dan mengetahui tentang tranparansi dana desa.
- c. Untuk meningkatkan penyelenggara pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan dengan baik mengenai tentang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- d. Untuk mengetahui apakah pendapatan masyarakat atau perekonomian masyarakat meningkat dengan adanya pembangunan dari dana desa.
- e. Untuk mengetahui apakah pemerintahan desa leppangeng sudah mengelolah dana desa dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada, karena dalam proses pembangunan, tidak hanya asal membangun saja.
- f. Agar penyusunan program tepat dalam suatu rencana yang baik dan perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman dalam bertindak dan bekerja.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Leppangeng kecamatan Ajangale kabupaten Bone yang dilihat dari beberapa aspek yaitu ,Ketepatan penentuan waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan dalam pengukuran, Ketepatan dalam berfikir.

- a) Pada efektivitas Ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan Pekerjaan pembuatan jalan,talud dan perkerasan,perintisan jalan,pembuatan jalan paving block, dan lain-lain desa Leppangeng sudah optimal karna adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja yang melibatkan sebagian masyarakat desa leppangeng .
- b) Pada Efektivitas dengan Ketepatan perhitungan biaya. Dalam menjalankan program, di desa Leppangeng sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan di tinjau dari segi kualitas bangunan.
- c) Pada Efektivitas dengan Ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada pembangunan gedung perintisan jalan dan lain lainnya.
- d) Pada efektifitas untuk Ketepatan berpikir merupakan tindakan awal yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Para pengambil keputusan dalam hal ini kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa bahkan para pengambil keputusan yang ada, telah melakukan pengkajian yang secara lebih mendalam atas setiap usulan yang diaspirasikan baik itu bersifat diskusi maupun sampai musyawarah dalam merumuskan dan pengambilan keputusan sehingga cukup efektif.

Dapat disimpulkan bahwa apa yang dibangun dari dana desa ini sesuai dengan harapan masyarakat dan apa yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan hasil dari pembangunan, pembangunan desa selama ini telah banyak memberi perubahan bagi Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale kabupaten Bone. Dari semenjak dianggarkan dana desa pembangunan yang laksanakan bersifat infrastruktur fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dari hasil observasi penulis dilapangan terlihat bahwa pembangunan yang dilkaukan sesuai dengan harapan masyarakat Desa Leppangeng. Pembangunan tidak asal jadi namun telah memiliki kualitas bangunan yang cukup baik karena dikontrol oleh masyarakat. Hasil yang baik ini membuat masyarakat cukup puas dari mulai perencanaan sampai dengan pembangunan sesuai dengan harapan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Anggaran yang bersumber dari pusat bernama Dana Desa harus dimaksimalkan dalam rangka pembangunan desa kuntuk menjadi lebih baik. Desa menjadi tonggak kemajuan negara secara utuh sehingga membangun infrastruktur merupakan kebutuhan yang sangat penting. Pembangunan yang efektif adalah pembangunan sesuai dengan harapan penerima manfaat pembangunan. Dari penelitian yang dilakukan penulis tentang efektifitas dana desa di Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Efektifitas Dana Desa di Leppangeng sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama. Pembangunan seperti MCK, Jalan Tani, Saluran Pembuangan, kantor desa, Gedung Paud dan Pembenahan Kantor Desa.
- 2) Pembangunan yang dilakukan oleh tim pelaksana Dana Desa dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan dengan pengawasan semua pihak termaksud masyarakat. Mengawasi bersama pembangunan infrastruktur menjadi sesuai seperti yang direncanakan di awal.

Saran

Setelah melakukan penelitian di Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone berkaitan dengan efektivitas penggunaan Dana Desa maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dana Desa seharusnya dapat digunakan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak semata-mata untuk pembangunan fisik. Banyak potensi yang bisa digarap di Desa Leppangeng kecamatan Ajangale untuk pemberdayaan ekonomi seperti pemberian modal usaha kecil.
- 2) Masyarakat dapat selalu menjaga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan secara bersama, sehingga akan bisa terus dinikmati dalam waktu yang lama.
- 3) Memprioritaskan untuk infrastruktur pertanian dalam melakukan pembangunan, seperti saluran air, pagar sawah, jalan sawah, karena pertanian merupakan ujung tombak ekonomi masyarakat Desa Leppangeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Tunggal Wijaya, *Manajemen suatu Pengantar*, (Jakarta, Rineka Cipta Jaya, 1999),
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung:Refika Aditama, 2010)
- J. Koho Riwu, *Ilmu Sosial Dasar*, Yogyakarta: Usaha Nasional, 1989
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008
- Kartasmita Ginandjar., *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO. 2001
- Konsep Dasar Pembangunan Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014
- Kunarjo, Perencanaan dan pengendalian Program Pembangunan (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002)
- Makmur, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Refika Aditama: 2012)
- Moderen Dalam Desa Otonomi Desa. (P.T. Alumni, Bandung : 2010 hal 3)
- Mubiyarto, *Pembangunan Pedesaan dan masalah Kepemimpinan*. LIBERTY. Yogyakarta. 1984
- Nasir, *Metode Penelitian* (Bandung: Galia Indonesia, 2009)
- Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta; Erlangga
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*.
- Rahardjo Adisasmita. *Pembangunan Pedesaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta: 2013
- Robert J. Kodoatie, *Manajemen Rekayasa Infrastruktur*. (Pustaka Pelajar : 2003)
- S.P. Siagian, *Manajemen*, Yogyakarta : Liberty, 1978
- Saputra Wayan I 2016 Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean, Kecamatan Kimtani, Kabupaten Bangli.

Siagian Sondang. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. (Jakarta. Bumi Aksara: 2005)

Sulastri, Nova 2016 Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.

Sun'an Muammil, & Senuk Abdurrahman. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.2015

Supriyatna,. *Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Pustaka Utama. Yogyakarta: 1985
Syarifuddin, Ateng dan Na'a, Suprin. *Pergulatan Hukun Tradisional dan Hukum*

Widjaja Haw. *Otonomi Daeran dan Daerah Otonomom*. (P.T Raja Grafindo Persada,Jakarta:2011)hal.165

Website

(<http://talikata11.blogspot.co.id/2015/05/makalah-alokasi-dana-desa-berdasarkan.html>)

Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Oleh Agung Pratama

ditjenpp.kemenkumham.go.id diakses pada Februari 2019

<http://astadi77.blogspot.co.id/2016/04/makalah-alokasi-dana-desa.html> di akses pada Februari 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Leppangeng,_Ajangale,_Bone Data Jumlah penduduk

